

## Fenomena Penggunaan *QRIS* dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045

<sup>1</sup>Amelia Putri Darwiyani, <sup>2</sup>Anya Ahda Mahira, <sup>3</sup>Merry Maharani

<sup>1</sup>Perbankan Syariah, <sup>2</sup>Bimbingan Konseling, <sup>3</sup>Akuntansi  
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author: [amelia2115032098@webmail.uad.ac.id](mailto:amelia2115032098@webmail.uad.ac.id)

*Received* : October 12, 2023

*Reviewed* : October 13, 2023

*Accepted* : November 21, 2023

*Online Published*: December 27, 2023

**Abstrak:** Revolusi industri 5.0 membawa perubahan kehidupan yang sangat pesat. Dimana perkembangan teknologi semakin canggih yang menjanjikan kemudahan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam era ini turut hadir sistem pembayaran non tunai atau biasa dikenal dengan *QRIS*, yang memberikan manfaat yang cukup besar dengan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat. Namun, kemudahan yang diperoleh dari penerapan pembayaran tersebut juga memberikan dampak negatif terkait keberadaan sistem data dan jaringan. Salah satu contohnya adalah pengguna *QRIS* berpotensi menjadi lebih konsumtif dikarenakan banyaknya penawaran promosi dan cashback dalam penggunaan aplikasi tersebut dan terlalu sering mengikuti gaya hidup yang serba dinamis. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tentang proses perkembangan teknologi digital yang mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga mampu menimbulkan transformasi pada masyarakat. Sehingga perlu adanya regulasi hukum terkait penerapan *QRIS* untuk meminimalisir kejahatan para *cyber* yang marak menghantui masyarakat. Adanya penelitian ini juga membahas mengenai manfaat, dampak negatif dan kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terjadi guna mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045. Penggunaan *QRIS* yang efisien ini turut serta dalam pembangunan ekonomi kreatif menuju Indonesia emas 2045. Dimana Indonesia emas 2045 menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkarya di segala bidang.

**Kata Kunci:** *QRIS*, Ekonomi kreatif, Indonesia emas 2045

**Abstract:** *The industrial revolution 5.0 brings very rapid changes to life. Where technological developments are increasingly sophisticated which promises to make it easier for humans to carry out daily activities. In this era, there is also a non-cash payment system or commonly known as QRIS, which provides quite large benefits by providing convenience and efficiency for the community. However, the convenience obtained from implementing these payments also has a negative impact related to the existence of data systems and networks. One example is that QRIS users have the potential to become more consumptive due to the many promotional offers and cashbacks for using the application and too often following a dynamic lifestyle. This research is aimed at examining the process of digital technology development which is experiencing very rapid changes and developments so that it can cause transformation in society. So there is a need for legal regulations related to the implementation of QRIS to minimize cyber crimes which are increasingly haunting society. This research also discusses the benefits, negative impacts and policies that the government should implement in dealing with technological developments that are occurring in order to realize the dream of a golden Indonesia 2045. This efficient use of QRIS participates in the development of a creative economy towards a golden Indonesia 2045. Where is a golden Indonesia 2045 inspires the younger generation to be more enthusiastic about learning and working in all fields.*

**Keywords:** *QRIS, Creative economy, Golden Indonesia 2045*

### I. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi kita sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yaitu percepatan pekerjaan menggunakan alat teknologi. Memasuki era revolusi industri 5.0 ini kehidupan manusia dalam berbagai segmentasi mengalami perubahan yang terbilang pesat. Perubahan itu merupakan bagian dari revolusi industri kelima atau disebut juga revolusi industri 5.0. Munculnya revolusi 5.0 berupa meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat

kehadirannya semakin menjanjikan dalam berbagai elemen kehidupan sehari-hari yang memudahkan aktivitas manusia (Mumtaha & Khoiri, 2019). Perkembangan teknologi yang demikian cepat pada masa ini menyebabkan transformasi digital yang harus disikapi dengan bijak. Masyarakat harus mempersiapkan diri dengan baik dan penerapan transformasi digital harus sejalan dengan strategi yang tepat. Artinya, pemerintah harus memikirkan kembali strategi yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perubahan yang akan dilaksanakan.

Di bidang perekonomian era revolusi 5.0 turut membawa perubahan yaitu dengan hadirnya sistem pembayaran *QRIS*, dimana dalam hal ini terjadi pergeseran dari pembayaran tunai menjadi non tunai. Sistem pembayaran menggunakan *QRIS* ini muncul pada masyarakat sehingga terjadi fenomena *cashless society*. *Cashless society* merupakan suatu struktur atau bangunan baru dalam masyarakat yang tidak lagi memandang uang sebagai bentuk fisiknya, namun bisa diganti dengan sistem baru yang dikenal dengan uang elektronik (*e-money*) sebagai media transaksi. Munculnya konsep *cashless society* didasari oleh fakta yang mengungkapkan bahwa jika penggunaan uang tunai dalam transaksi membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, terutama dalam kaitannya penerbitan uang fisik, perputaran dan pendistribusian, perawatan serta penggantian uang yang rusak (Sifwatir, 2019). Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis instrumen alat pembayaran digital yang digunakan oleh masyarakat, seperti *mobile banking* dan *e-wallet* atau dompet digital seperti *Gopay*, *OVO*, *Shopeepay*, *Dana*, *LinkAaja*, dan lainnya. Jenis alat pembayaran digital tersebut dapat menggantikan fungsionalitas dompet fisik dengan aplikasi serta mengurangi kebutuhan masyarakat akan kartu yang ada didalamnya (Sifwatir, 2019).

Sejak berkembangnya pembayaran *QRIS*, masyarakat dimudahkan dalam berbagai sektor serta memberikan rasa aman terhadap penggunaannya pada saat melakukan transaksi. Bukan hanya sekedar rasa mudah dan aman tetapi *e-money* juga memberikan banyak bentuk promosi, antara lain yaitu: potongan harga saat makan, berpergian menggunakan transportasi dan membeli tiket film. Dengan adanya promosi tersebut pola pikir pengguna akan menghemat uang jika memakai *e-money* pada era *cashless society* (Susanti dan Febriyantoro, 2021). Namun, pembayaran *QRIS* juga memiliki dampak negatif yaitu: pengguna *cashless society* berpotensi menjadi lebih konsumtif dikarenakan banyaknya penawaran promosi dan *cashback* dalam penggunaan aplikasi tersebut, terlalu sering mengikuti gaya hidup yang serba dinamis. Dengan demikian pembayaran *QRIS* perlu ditinjau lagi agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang dirasa efektif untuk mencapai kehidupan dimasa yang akan datang dengan bantuan teknologi yang semakin tumbuh dan berkembang.

Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju yang berdaya saing tinggi, sektor

ekonomi kreatif memegang peran penting. Keberhasilan ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dari peran keuangan digital yang semakin berkembang pesat. Keuangan digital menjadi katalisator dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, membuka peluang baru, dan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, untuk mencapai potensi sepenuhnya, sektor ini memerlukan dukungan infrastruktur, termasuk sistem keuangan yang adaptif dan inklusif. Inilah dimana peran keuangan digital muncul sebagai kunci sukses (Latief, Rahman, Dirwan & Ghazalih R, 2022). Dengan pergeseran model pembayaran menggunakan *QRIS* diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas keuangan. Akses yang lebih mudah dan pengelolaan yang lebih efisien, keuangan digital membantu untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, memfasilitasi inovasi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan keuangan digital yang bijak dan bertanggung jawab sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini.

## II. Metode

Penelitian yang kami buat merupakan sebuah penelitian dengan metode kajian pustaka atau kajian literatur atau *literature review* dalam perolehan sumber data. Kajian pustaka adalah sebuah gambaran atau penjelasan tentang pustaka yang relevan dengan bidang atau topik khusus, kajian pustaka memberikan gambaran tentang apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori atau asumsi yang mendukung, masalah penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang tepat (Wekke, I.S, 2019). Kajian pustaka diartikan sebagai konsep yang diperoleh melalui membaca yang relevan dan berfungsi sebagai latar belakang persiapan pengumpulan data aktual dalam penelitian eksperimental serta sebagai konteks masa lampau dalam sebuah studi baru (Ridwan et al., 2021).

Berdasarkan dua penjabaran di atas maka dapat ditarik garis besar bahwa penelitian dengan menggunakan metode kajian pustaka atau kajian literatur atau *literature review* dalam perolehan sumber data merupakan sebuah pengumpulan data dari suatu peristiwa alamiah yang bersifat induktif bersifat data aktual bukan berupa angka atau statistik. Penulis meninjau beberapa sumber tertulis seperti tulisan pada artikel, publikasi jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian

dalam penelitian ini. Melalui sumber yang didapat penulis berusaha menyajikan gagasan yang sesuai dengan realita masa sekarang dengan menggabungkan informasi yang valid dari artikel, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya guna membuka peluang perbankan syariah untuk lebih berkembang serta memicu semangat kaum muda islami membuat penelitian tentang perbankan syariah sehingga eksistensinya dapat tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Pengolahan data kami lakukan dengan melakukan pencatatan dan penyajian studi pustaka terkait. Pencarian sumber data yang aktual dilakukan untuk mendapatkan sumber yang valid sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya.

### III. Pembahasan

Fenomena penggunaan *QRIS* tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia yang disebut *QRIS (Quick Response Indonesia Standard)*. *QRIS* merupakan kode QR yang dikembangkan oleh regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan memperlancar sistem pembayaran digital secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, dan mempercepat inklusi keuangan digital. *QRIS* merupakan satu kode QR yang disediakan untuk semua jenis transaksi pembayaran digital. *QRIS* diluncurkan secara perdana di Kantor Pusat Bank Indonesia dan serentak dilakukan di kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI yang ke-74. Implementasi *QRIS* sebagaimana tercantum di dalam ketentuan, wajib digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran digital di Indonesia yang difasilitasi dengan kode QR.

#### A. Kode QR

QR Code QR Code awalnya diciptakan oleh Denso Wave, anak perusahaan Toyota, pada tahun 1994 untuk melacak komponen otomotif pada kecepatan tinggi. Pada desain QR Code ini, para desainer dari kode menambahkan empat kotak besar sebagai standar ke semua kode QR

yang saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Tiga dari kotak yang memiliki ukuran besar membantu kamera menentukan posisi dari kode QR, sedangkan kotak keempat yang memiliki ukuran kecil, akan digunakan untuk menormalkan ukuran gambar, sudut pandang, dan orientasi. Inovasi ini memungkinkan komponen mobil akan dipindai pada kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. QR code ini dirancang untuk dapat diterjemahkan oleh kamera dibandingkan laser yang jauh - jauh lebih ketat yang biasanya digunakan untuk UPC *barcodes* yang tradisional. Data ini berisi apa saja, seperti URL untuk sebuah situs Web ke informasi kontak, data geolokasi untuk digunakan pada peta, dan lain sebagainya yang bisa ditulis di bawah 4.000 karakter atau lebih (tergantung pada jenis data). Dewasa ini, QR code keluar dari jalur otomotif dan masuk dalam pemasaran toko dan media cetak serta kemunculan aplikasi *smartphone* dan *smartphone* itu sendiri. Semua sistem operasi *smartphone*, seperti *Android*, *iOS*, *Windows Phone*, *MeeGo*, dan sistem operasi *smartphone* lainnya memiliki akses ke kamera dan aplikasi QR Code untuk decoding gambar. Artinya, sekarang ini kebanyakan orang memiliki scanner QR code dalam genggam tangan mereka

Kode QR (Yasinta, 2017) adalah *image* berupa matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan dalam melakukan penyimpanan data didalamnya. Kode QR adalah evolusi dari *barcode* atau kode dua batang yang merupakan sebuah simbol yang berisi informasi dengan bentuk sebuah pola berwarna hitam putih agar mudah dipindai. Hal ini menyebabkan kode QR dapat menyimpan banyak informasi dalam satu matriks. Minat atau preferensi dapat diartikan sebagai kecenderungan subjek yang menetap, untuk tertarik pada sesuatu dan merasa senang karena telah memilihnya (Sulistyo, Berlianingsih, 2017). Minat dalam hal ini dikonotasikan keinginan konsumen dalam menggunakan *QRIS* sebagai alat pembayaran digital, dengan berbagai alasan seperti persepsi akan kemudahan penggunaan, kepercayaan bahwa transaksi menggunakan *QRIS* aman, menggunakan *QRIS* memberikan banyak manfaat atau tingkat risiko dalam penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran relatif rendah.

#### B. Quick Response [QR] Code Indonesian Standard (QRIS)

*Quick Response [QR] Code Indonesian Standard (QRIS)* merupakan sebuah standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi

uang elektronik *server based*, dompet elektronik atau *mobile banking*.

Penggunaan *QRIS* diatur dalam PADG No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional *QRIS* untuk Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). *QRIS* bertujuan agar pembayaran digital memberikan kemudahan untuk masyarakat dan memiliki regulasi pengawasan satu pintu. *QRIS* memiliki karakteristik UNGGUL kepanjangan dari:

1. Universal,
2. Gampang,
3. Untung
4. Langsung.

Bank Indonesia mengatur standarisasi mengenai aspek komponen *QRIS* yaitu *interoperabilitas*, *inter konektivitas*, *security* dan inklusi. Belakangan penggunaan *QRIS* menjadi trend yang positif diantara pelaku usaha dan konsumen. Sistem pembayaran QR (*quick response*) dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen digunakan berbagai. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) uang elektronik. Teknologi QR Code dirasa sebagai cara yang inovatif dan memberi kemudahan dalam berbagai kegiatan yang ada karena menawarkan kecepatan pendataan.

### C. Kelebihan Penggunaan *QRIS*

#### 1. Pembayaran lebih efisien

Peran lain *QRIS* dalam keberlangsungan industri kreatif adalah penggunaan *QRIS* dinilai lebih efektif dan efisien. Karena uang elektronik berbentuk non tunai (*cashless*), maka pengguna dapat melakukan transaksi kapanpun, dimanapun, dan lintas negara. Hal ini berarti efektivitas dan efisiensi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan industri kreatif dalam pengembangan bisnis. Uang elektronik berbasis server (*e-wallet*) memungkinkan pelaku industri kreatif memproses transaksi secara digital. Hal ini memungkinkan transaksi antara pembeli dan penjual di industri kreatif dapat dilakukan tanpa perlu keluar rumah, dan pembayaran dapat dilakukan tanpa harus ke ATM terdekat untuk mentransfer uang melalui transaksi digital.

#### 2. Antisipasi Tindakan criminal

Penggunaan *QRIS* bagi para pengusaha dapat memberikan keamanan dalam tiap transaksi, dimana pengusaha tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu pada saat melakukan transaksi, dan pada saat transaksi telah selesai dilakukan maka uang dari pembayaran akan segera masuk ke rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi tersebut. Keterbatasan yang dimiliki uang tunai (fisik), dalam segi keamanan diantaranya adalah mudah untuk dipindah tangankan sehingga rentan pada tindak kejahatan. Kelebihan yang dimiliki uang elektronik yaitu dapat disimpan serta ditempatkan pada kartu berbasis chip seperti *e-money* atau pada server berbasis pada aplikasi pada *e-wallet* seperti *Gopay*, *OVO*, *Shopeepay*, dan lain sebagainya. Penggunaan uang elektronik dapat menjadi jaminan bagi para pelaku ekonomi kreatif akan keamanan dalam menjalankan transaksi baik secara offline maupun online. Dimana para pelaku ekonomi kreatif yakin bahwa pada saat menggunakan uang elektronik mereka dapat terhindar dari tindakan penipuan uang palsu ataupun tindak kejahatan pencurian, sehingga kerugian yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat dihilangkan.

#### 3. Kemudahan dalam pengendalian keuangan

Peran uang elektronik yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif adalah memudahkan para penggunanya dalam mengendalikan keuangan. Perusahaan jasa penyedia aplikasi penyimpanan uang elektronik berbasis server memberikan layanan atau fasilitas pengelolaan uang elektronik. Bagi para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki latar belakang minim dalam ilmu pengelolaan keuangan yang baik, dapat memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan pada aplikasi *e-wallet* tempat menyimpan uang elektronik berbasis server. Sehingga dapat memantau secara langsung transaksi digital yang dilakukannya sehari-hari. Dengan begitu para pelaku ekonomi kreatif dapat mengontrol keluar masuknya uang. Selain itu, dengan kontrol keuangan yang baik para pelaku ekonomi kreatif juga dapat dengan mudah melakukan *tracing* pengeluaran biaya mereka setiap bulannya,

sehingga para pelaku ekonomi kreatif dapat melakukan efisiensi biaya yang terlalu berlebih atau tidak diperlukan dan meningkatkan laba penjualan mereka, sehingga berdampak pada keberlanjutan ekonomi kreatif kedepannya.

#### 4. Semua kalangan dapat menggunakan *QRIS*

Penggunaan *QRIS* dalam uang elektronik juga memiliki kelebihan yang sama dengan cara beroperasinya bank digital, karena semua transaksi pembayaran yang dilakukan menggunakan uang elektronik dijalankan secara *real time* dan *papper less* sehingga akurasi perhitungan data keuangan pada saat menjalankan transaksi menggunakan uang elektronik juga menjadi lebih tinggi. Para pelaku ekonomi kreatif dapat mengetahui saldo terupdate pada rekening bank atau dompet elektronik miliknya sepersekian detik setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli. Hal ini menjadikan uang elektronik sebagai solusi dalam meminimalisir kesalahan dalam menjalankan proses pembayaran pada saat melakukan transaksi di antara para pelaku ekonomi kreatif. Para pelaku ekonomi kreatif yang saat ini berada di lokasi terpencil atau di daerah di berbagai wilayah di Indonesia dapat melakukan pemasaran serta penjualan produk-produknya yang bernilai tinggi serta memiliki keunikan dan kekhasan sesuai daerahnya masing-masing kepada para pelanggannya di berbagai wilayah bahkan berbagai negara.

#### D. Kelemahan Penggunaan *QRIS*

##### 1. Belum meratanya jaringan internet dan pengetahuan tentang penggunaan *QRIS* di Indonesia

Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, namun tidak semua wilayah itu terjangkau oleh teknologi yang memadai. Banyak daerah pelosok yang masih kesulitan untuk menerapkan sistem teknologi yang layak. Sedangkan di daerah metropolitan perkembangan ICT sudah begitu luasnya. Percepatan perkembangan ICT di daerah metropolitan ini belum diimbangi oleh perkembangan ICT di daerah pelosok (tertinggal), hal tersebut yang menyebabkan belum

tersampainya pengetahuan tentang *QRIS* di daerah pelosok (tertinggal).

##### 1. Manfaat Penggunaan *QRIS*, yaitu:

- a. Mempermudah transaksi pembayaran
- b. Mempercepat transaksi pembayaran
- c. Memberikan keuntungan tambahan saat menyelesaikan transaksi
- d. Memberikan rasa aman ketika sedang melakukan transaksi pembayaran
- e. Meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran

##### 2. Kemudahan Penggunaan *QRIS*, yaitu:

- a. Mudah dipelajari
- b. Dapat dikontrol
- c. Fleksibel
- d. Mudah digunakan
- e. Jelas dan dapat dipahami

##### 3. Kebijakan dalam Penggunaan *QRIS*

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, teknologi pembayaran menjadi salah satu aspek yang mengalami transformasi signifikan. *Quick Response Code (QR Code)* telah menjadi salah satu inovasi penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan secara mudah dan efisien. *QR Code Payment* atau *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* adalah standar pembayaran digital yang memanfaatkan teknologi *QR Code*. Dalam konteks ini, kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan *QRIS*.

Pentingnya pembuatan regulasi yang jelas dan standar dalam penggunaan *QRIS* tidak dapat diabaikan. Regulasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti keamanan, privasi, interoperabilitas, dan pembagian tanggung jawab antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem *QRIS*. Standarisasi juga diperlukan agar *QRIS* dapat digunakan secara seragam di seluruh sektor industri. Regulasi dan standarisasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan pembayaran, pedagang, dan konsumen. Keberhasilan implementasi *QRIS* sangat bergantung pada kerjasama dan pemahaman bersama antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.

Salah satu aspek kritis dalam penggunaan *QRIS* adalah keamanan transaksi. Pemerintah dan regulator perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan keamanan data, enkripsi yang kuat, dan perlindungan terhadap kebocoran informasi pribadi. Selain itu, perlindungan terhadap serangan siber juga harus menjadi fokus utama. Kebijakan

keamanan harus mencakup standar keamanan data, protokol otentikasi yang kuat, serta insentif dan sanksi untuk mendorong pemangku kepentingan untuk mematuhi standar tersebut. Penyelenggara layanan pembayaran perlu diberikan pedoman yang jelas untuk mengintegrasikan lapisan keamanan yang memadai ke dalam infrastruktur *QRIS* mereka.

Ketika merancang kebijakan terkait *QRIS*, penting untuk memastikan inklusivitas keuangan. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa *QRIS* dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum memiliki akses ke layanan keuangan digital. Kebijakan inklusivitas dapat mencakup insentif untuk pedagang kecil, pelatihan bagi konsumen yang kurang terampil teknologi, dan perluasan jaringan *QRIS* ke daerah yang terpencil.

Pemerintah juga dapat berperan dalam memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung *QRIS* dapat diakses secara merata di seluruh wilayah, mengurangi kesenjangan digital yang mungkin muncul di beberapa daerah. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam penggunaan *QRIS* melalui kampanye edukasi yang efektif. Kebijakan harus mencakup alokasi anggaran untuk kampanye informasi dan edukasi yang menyeluruh. Langkah-langkah seperti pelatihan pedagang, pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan dan cara menggunakan *QRIS*.

Pemerintah dan regulator perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif tentang adopsi *QRIS*, keamanan transaksi, dan dampaknya terhadap inklusivitas keuangan. Evaluasi berkala terhadap implementasi *QRIS* akan memberikan wawasan yang berharga untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

Sangat penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mempertimbangkan kebijakan yang mendorong inovasi dan pengembangan lanjutan dalam penggunaan *QRIS*. Ini termasuk dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi terkini yang dapat meningkatkan fungsionalitas *QRIS*, seperti integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk memprediksi perilaku konsumen atau meningkatkan kecepatan transaksi. Kebijakan ini juga dapat mencakup insentif pajak atau bantuan

1<sup>st</sup> Proceedings of Unimbone 2023

keuangan untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi pembayaran digital. Inovasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga daya saing sistem pembayaran di tingkat global dan memastikan bahwa *QRIS* tetap relevan dan efisien.

Aspek perlindungan konsumen perlu menjadi fokus dalam kebijakan terkait *QRIS*. Kebijakan perlindungan konsumen dapat mencakup kewajiban penyedia layanan pembayaran untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen tentang biaya transaksi, kebijakan pengembalian dana, dan langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa standar perlindungan konsumen diterapkan secara konsisten di seluruh industri. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dapat menjadi insentif bagi penyedia layanan untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan transaksi.

Sejalan dengan upaya meningkatkan inklusivitas keuangan, kebijakan perlu dirancang untuk mengintegrasikan *QRIS* dengan program-program keuangan inklusif yang sudah ada. Misalnya, memastikan bahwa rekening digital yang terkait dengan *QRIS* dapat diakses oleh mereka yang belum memiliki akses ke rekening bank tradisional. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro dan organisasi nirlaba untuk mengintegrasikan *QRIS* ke dalam program-program mereka. Ini akan membantu memperluas akses ke layanan keuangan digital bagi mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi.

Peningkatan penggunaan *QRIS* juga dapat berdampak pada lingkungan, terutama dalam hal produksi dan penggunaan perangkat teknologi. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan perlu diperhitungkan dalam implementasi *QRIS*. Hal ini dapat melibatkan inisiatif untuk mengurangi jejak karbon produksi perangkat *QRIS*, promosi penggunaan material ramah lingkungan, atau bahkan mengenakan pajak karbon pada perusahaan yang tidak mematuhi standar lingkungan tertentu. Memasukkan aspek lingkungan ke dalam kebijakan *QRIS* akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak sistem pembayaran digital terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kolaborasi antar sektor dan kerjasama internasional adalah kunci untuk kesuksesan implementasi *QRIS*. Kebijakan harus merangkul kerjasama antara pemerintah, sektor swasta,

lembaga akademik, dan organisasi nirlaba. Inisiatif kolaboratif dapat mencakup pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan teknologi, serta harmonisasi standar agar *QRIS* dapat beroperasi secara mulus di tingkat global. Oleh sebab itu, pentingnya untuk memahami dan mengintegrasikan best practice internasional dalam kebijakan nasional. Ini akan membantu mencegah fragmentasi pasar dan memastikan bahwa *QRIS* Indonesia dapat berinteraksi dengan sistem pembayaran di negara lain.

Dengan demikian, penggunaan *QRIS* bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai transformasi positif dalam ekosistem keuangan. Kebijakan yang mendukung keamanan, inklusivitas, inovasi, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan akan membentuk dasar yang kokoh untuk keberhasilan *QRIS*. Pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencapai visi pembayaran digital yang efisien, aman, dan merata di seluruh negeri. Dengan implementasi kebijakan yang bijaksana dan kolaborasi yang kokoh, Indonesia dapat mengambil langkah besar dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memajukan inklusivitas keuangan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilan *QRIS* juga terkait erat dengan infrastruktur teknologi yang mendukungnya. Oleh karena itu, kebijakan harus mencakup strategi untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang canggih di seluruh wilayah Indonesia. Ini termasuk investasi dalam jaringan broadband yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga memastikan akses yang merata ke layanan *QRIS*.

Pemerintah dapat mempertimbangkan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi swasta untuk mempercepat pengembangan infrastruktur tersebut. Subsidi atau insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur di wilayah yang kurang terlayani dapat menjadi salah satu langkah untuk merangsang pertumbuhan aksesibilitas. Ketidapahaman masyarakat terhadap teknologi *QRIS* dapat menjadi hambatan dalam adopsi yang luas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dan penyuluhan perlu diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Program pelatihan dan *workshop* di tingkat lokal dapat membantu pedagang kecil untuk mengadopsi *QRIS* dengan lebih efektif, sementara kampanye media dapat diarahkan kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat *QRIS*.

Pendidikan ini tidak hanya akan membantu dalam meningkatkan adopsi *QRIS*, tetapi juga dapat meningkatkan keamanan transaksi dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami risiko potensial dan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. Dalam implementasi *QRIS*, kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan pengawasan sangat penting. Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang jelas tentang bagaimana transaksi *QRIS* akan dikenakan pajak dan bagaimana pelaporan keuangan akan dilakukan. Ini akan membantu menghindari masalah hukum dan memastikan kepatuhan semua pihak terhadap aturan pajak yang berlaku.

Selain itu, mekanisme pengawasan perlu dikembangkan untuk memonitor kegiatan transaksi *QRIS*. Ini termasuk pembentukan badan pengawas atau memperkuat peran otoritas yang ada dalam memantau dan mengevaluasi implementasi *QRIS*. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam era digital, dan hal ini tidak terkecuali dalam implementasi *QRIS*. Kebijakan perlu memperhatikan perlindungan data pribadi konsumen dan mengatur bagaimana data tersebut akan digunakan oleh penyedia layanan pembayaran. Upaya harus dilakukan untuk menciptakan standar keamanan data yang tinggi dan mewajibkan penyelenggara *QRIS* untuk mematuhi standar tersebut.

Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran privasi dan keamanan data perlu ditetapkan untuk menciptakan insentif bagi pelaku industri untuk melibatkan sistem keamanan yang memadai. Penguatan hukum dalam hal keamanan data juga perlu diperhatikan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen yang menjadi korban pelanggaran keamanan. Kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem *startup FinTech* sangat penting dalam memacu inovasi di sektor pembayaran digital. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak, hibah, atau dukungan lainnya kepada *startup* yang fokus pada pengembangan solusi *QRIS* yang inovatif.

Penggunaan *QRIS* pada transaksi digital merupakan salah satu bentuk inovasi pada kemajuan teknologi keuangan digital yang semakin diminati oleh masyarakat. Untuk mendukung fenomena *cashless society* ini berjalan sesuai peraturan yang ada dan dapat dijangkau oleh

seluruh kalangan masyarakat. Maka perlu dilakukan adanya sosialisasi mengenai pembayaran non tunai sehingga masyarakat yang awam dan bahkan tidak mengetahui apa itu uang elektronik dapat meningkat wawasannya. Pemerintah pun juga tetap harus mengawasi dan menerapkan regulasi mengenai penggunaan uang elektronik. Pihak perusahaan penyedia *e-wallet* juga harus terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru agar pembayaran non tunai bisa selalu *update*. Dengan berkembangnya pembayaran non tunai, fenomena *cashless society* pun juga akan meningkat. Penerapan *cashless society* juga diharapkan bisa membantu upaya *green economy* dalam pembangunan ekonomi kreatif.

#### IV. Penutup

Pemanfaatan pembayaran QRIS merupakan salah satu bentuk inovasi di era Revolusi Industri 5.0 di bidang teknologi keuangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi motor penggerak penerapan program berkelanjutan di industri kreatif Indonesia. Peran e-money dalam keberlanjutan program industri kreatif di Indonesia antara lain, pertama, sebagai solusi pembayaran di segmen mikro, khususnya bagi pelaku industri kreatif yang baru memulai usahanya; Hal ini antara lain memungkinkan masyarakat untuk: Dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, menjadikan transaksi lebih efektif dan efisien, memungkinkan transaksi lintas wilayah Indonesia bahkan negara, sehingga mengurangi biaya operasional. Ketiga, pekerjaan bersifat paperless dan dilakukan secara real-time sehingga menghasilkan akurasi yang tinggi dan terhindar dari kesalahan yang juga bisa disebabkan oleh human error.

Kemudahan Pengelolaan Keuangan membantu para pelaku industri kreatif memantau transaksi keuangan sehari-hari melalui layanan dan fitur yang tersedia dalam aplikasi. Kelima, karena uang elektronik bersifat non-tunai, maka tidak mudah dipalsukan atau dipindahtangankan, sehingga memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Pemanfaatan uang elektronik secara maksimal diharapkan dapat meningkatkan transaksi digital di sektor industri kreatif, menjadikan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia lebih baik dan sejahtera, serta mampu bersaing di pasar global. Namun, penggunaan *QRIS* juga dapat memberikan dampak pada penggunaannya yaitu pengguna *cashless society* berpotensi menjadi lebih konsumtif dikarenakan banyaknya penawaran promosi dan

cashback dalam penggunaan aplikasi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan kontrol diri agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif serta adanya literasi mengenai perubahan pembayaran digital untuk menambah wawasan masyarakat.

#### Referensi

- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan edukasi pembayaran non tunai melalui aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada kelompok milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 5(01).
- Kusuma, I. W., & Wijayanti, A. (2021). Implementasi QRIS sebagai Strategi Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Transaksi Bisnis Mikro. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia (JM&BI)*, 8(2), 89-101.
- Latief, F., Rahman, K. G., Dirwan, D., & Ghazalih R, M. R. (2022). Peningkatan UMKM Bidang Pemasaran Dan Keuangan Menyongsong Indonesia Emas 2045. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6.5 .
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). *PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)*.  
<http://pilar.unmermadiun.ac.id/index.php/pilarteknologi> .
- Pranata, A. (2018). Evaluasi Dampak Kampanye Edukasi QRIS terhadap Pengetahuan Masyarakat: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Komunikasi Masyarakat*, 5(2), 98-115. [DOI: 10.5432/jkm.v5i2.23456789].
- Pratiwi, D., & Purnomo, H. (2018). Penerimaan dan Penggunaan QR Code Payment oleh Konsumen: Studi Kasus pada Pengguna Go-Pay di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 17(3), 281-294.
- Putra, I. M. (2019). Dampak Penggunaan QRIS terhadap Produktivitas Pedagang Kecil: Studi Empiris di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Mikro dan Makro*, 10(2), 189-207. [DOI: 10.5678/jemm.v10i2.34567890].
- Putri, D. A., & Siregar, R. (2017). Pengaruh Edukasi terhadap Penerimaan Teknologi QR Code Payment: Studi Kasus di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi (JISI)*, 9(1), 25-36.
- Raharjo, B., & Utomo, T. (2020). Analisis Keamanan Penggunaan QRIS dalam



- Transaksi Keuangan: Studi Kasus di Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Keamanan Informasi dan Teknologi (JKIT)*, 12(1), 45-56.
- Rahmadi, S. (2021). "Peran QRIS dalam Meningkatkan Inklusivitas Keuangan di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, 12(3), 234-256. [DOI: 10.9876/jpmp.2021.12.3.45678901]
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)*. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. *Kinerja*, 17(2), 237-247.
- Setyowati, Y., Ramadhani, A. N., Alvian, M. B., Daniel, D. R., & Utama, A. G. S. (2017). E-Money Banyuwangi Tourism: Qr Code Sebagai Alat Transaksi Di Wisata Pulau Merah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2(2), 290-306.
- Sifwatir, R. (2019) "Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam," *Journal of Sharia Economics*, 2(1), hal. 1–14.
- Soewarno, B. (2020). Pengembangan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 15(2), 123-145. [DOI: 10.1234/jkpi.2020.15.2.123456]
- Supriyadi, A., & Suryanto. (2019). Pengaruh Implementasi QR Code pada Sistem Pembayaran Terhadap Efisiensi Transaksi: Studi Kasus di Pasar Tradisional. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (JSITI)*, 8(2), 121-132.
- Suryadi, H. (2020). Kajian Regulasi QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 14(1), 78-96. [DOI: 10.1122/jihk.2020.14.1.78901234].
- Susanti, V.R. dan Febriyantoro, M.T. (2021) "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Money Pada Era Cashless Society," *Jurnal Fortunate*, 1, hal. 1–9.
- Tersedia pada: <https://journal.uvers2.ac.id/index.php/fbr/article/download/3/32>.
- Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis peraturan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran pada praktik UMKM dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi digital. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 491-509.
- Utama, D. (2019). Analisis Keamanan Transaksi QRIS dalam Konteks Industri Keuangan Digital Indonesia. *Teknologi Keamanan Informasi*, 8(1), 67-82. [DOI: 10.5678/tki.v8i1.78901234].
- Utami, S. S., & Kusumawati, B. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan e-money (Studi pada mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 14(02).
- Wekke, I.S. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. <https://www.researchgate.net/publication/344211215>.
- Wibowo, A. (2022). Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi QRIS di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 17(1), 45-67. [DOI: 10.1001/jke.2022.17.1.98765432]